

MENINJAU KEMBALI EKONOMIKA NEOKLASIK

Mubyarto

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

*Economic Faculties in Indonesian Universities have been teaching economics in the Neoclassical tradition as in Samuelson's **Economics**, a combination of Classical liberalism and Marginal Utility theory. But the development experience in the last 32 years which have created extreme inequalities in the distribution of wealth and income have raised the issues of economic and social justice. "Social economics insist that justice is a basic element of social economic organization – (which is) far more important than allocative efficiency. Inefficient societies abound and endure in the historical record but societies that lack widespread conviction as to their justness are inherently unstable. " The most fundamental difference between the social-economics perspective and that of mainstream economics is that the latter has for its principal focus the production of good and services while the former focuses on the reproduction of society. (E.K. Hunt, *History of Economic Thought A Critical Perspective*, 1979). An atmosphere need to be created whereby economists are prepared to take on what is best from the social science; economics is more likely to be changed by its friends than by its critics; in business as well as in theory we prefer not the metaphor of the invisible hand but rather that of the "invisible handshake" the spirit of cooperation and competition.¹⁾*

Keywords: justice, ideology, Neoclassical Economics, and social economics

PENDAHULUAN

Jika di sejumlah negara Barat yang sudah sangat maju perekonomiannya pakar-pakar ekonomi mempertanyakan **realisme** dan **relevansi** ilmu ekonomi bagi pembangunan suatu masyarakat/bangsa, di Indonesia yang baru memiliki Doktor Ekonomi pertama tahun 1943, masalah ini sangat sedikit dipersoalkan. Dosen-dosen/pengajar ilmu ekonomi di perguruan-perguruan tinggi tak banyak yang membaca buku-buku yang bersifat kritis tentang ini. Terakhir, kiranya tidak banyak ekonom arus utama yang berminat membaca buku *Matinya Ilmu Ekonomi (The Death of*

Economics) tulisan Paul Ormerod tahun 1994, padahal penulisnya pernah datang ke Jakarta (15 Januari 1998), dan berdiskusi dengan para ekonom senior kita.

Namun jika Paul Samuelson sendiri sebagai salah seorang "Nabi" ilmu ekonomi Neoklasik menyatakan bahwa ilmu ekonomi akan lebih besar kemungkinan diubah oleh teman-temannya daripada para pengkritiknya, kiranya pakar-pakar ekonomi Indonesia harus tidak mudah berpuas diri dengan ilmu yang digelutinya.²⁾ Terutama para dosen perguruan tinggi ada baiknya menanyakan pada sarjana-sarjana lulusannya, sejauh mana ilmu ekonomi

¹⁾ Alan Lewis and Karl Erik Warneryd, (Eds) *Ethics and Economic Affairs*, Routledge, 1994, hal. 372.

²⁾ dalam Moh. Arsyad Anwar, *Pemikiran Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, Gramedia 1992, hal 69-86.

yang dipelajari di perguruan tinggi benar-benar "memberi bekal" memadai untuk "bekerja" atau membuat analisis-analisis permasalahan ekonomi Indonesia. Pada tahun 1976 telah terbit buku *Economics in The Future* yang sangat tidak puas dengan ajaran ekonomika Neoklasik. Jan Tinbergen dan Gunnar Myrdal mengusulkan ilmu ekonomi yang (induktif) empirik dan memperhatikan kelembagaan (institutional)

THE JAKARTA SCHOOL OF ECONOMICS

Prof. Sumitro Djojohadikusomo adalah ekonom Indonesia pertama bergelar Doktor (1943). Fakultas Ekonomi yang didirikan Sumitro di Jakarta (1950), sering dikenal sebagai The Jakarta School of Economics. Namun berbeda dengan kesan umum adanya ciri FE-UI ini yang kadang-kadang disebut mengajarkan falsafah ekonomi **liberal**, "ciri khas" sebenarnya berbeda dari ilmu ekonomi "Neoklasik" yang diajarkan di Amerika Serikat yang makin banyak menggunakan model-model matematik. Sumitro dalam tulisan "Pendekatan Ekonomi terhadap Perspektif Sejarah" memulai tulisannya dengan menunjuk pada "Methodensreit" antara Mazab **Austria** (Carl Menger) dan Mazab **Historismus** (Gustav Schmoller) tahun 1873-74 yang dianggap oleh Joseph Schumpeter sebagai "pemborosan energi". Dalam tulisan ini jelas bahwa Sumitro lebih condong dan bersimpati pada mazab historismus yang bersifat **induktif-empiris** meskipun pendekatan ini tidak tegas-tegas dilawankan dengan pendekatan teoritik-analitik-matematik. Jika Sumitro lebih menekankan ciri JSE (Jakarta School of Economics) pada masalah-masalah pembangunan ekonomi jangka panjang dalam perspektif sejarah, maka Suhadi Mangkusuwondo mengembangkan argumen-tasi lebih lanjut menjadi masalah-masalah "makro" perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam proses pembangunan ekonomi jangka panjang³⁾.

Pada era Orde Baru ketika tokoh-tokoh teknokrat FE-UI diangkat menjadi menteri-menteri, khususnya sejak deregulasi/liberalisasi 1983-1993, JSE mendapat julukan baru sebagai fakultas yang mengajarkan paham liberal. Namun hal itu dibantah Suhadi.

Tidaklah benar anggapan sementara kalangan yang menyatakan bahwa alumni FE-UI berpandangan "liberal", dalam arti bahwa mereka terlalu percaya pada mekanisme pasar yang bebas... Mereka pada dasarnya adalah intervensionis, tidak percaya bahwa mekanisme pasar yang bebas akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang optimal⁴⁾

Pada tahun 1981, ketika terjadi Polemik Ekonomi Pancasila, muncul kesan adanya "kubu UI" dan "kubu UGM", yang pertama dianggap pro-pertumbuhan, sedangkan yang kedua pro-pemerataan. Selanjutnya saat terjadi reformasi politik ekonomi tahun 1998, **Warta Ekonomi** (November 1998) membuat **Cover Story** "Ekonomi Rakyat Menggeser Berkeley Mafia". Adi Sasono yang ditunjuk menjadi Menkop & UKM oleh Presiden Habibie memimpin barisan "pembela ekonomi rakyat", sedangkan sejumlah ekonom muda UI (Faisal Basri dan Chatib Basri) menganggap sepi ekonomi rakyat. Emil Salim menolak disalahkan telah memihak konglomerat. "Dari semula prioritas kami adalah pembangunan rakyat kecil dan (karena) sebagian besar rakyat tinggal di pedesaan, maka prioritas pembangunan harus pertanian." Menurut Emil Salim Ekonomi Indonesia memang mulai melenceng antara 1988-1993 dan sejak 1993 ekonom satu persatu mulai digusur oleh non ekonom⁵⁾

³⁾ Suhadi Mangkusuwondo, Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro: Perspektif Indonesia, dalam Hendra Esmara (Peny), *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Gramedia 1987.

⁴⁾ Suhadi Mangkusuwondo, idem h. 52-53 op.cit hal 47-65

⁵⁾ *Warta Ekonomi* No. 25/X/9 November 1998

Dalam semua debat di antara para ekonom sejak 1981 sampai 1998 tersebut, yang menjadi fokus adalah **strategi pembangunan ekonomi** bukan **teori ekonomi** atau **ilmu ekonomi**. Kini (2001-2002) karena krisis multidimensi yang berkepanjangan mulai dipersoalkan **teori ekonomi** atau **ilmu ekonomi** yang mendasarinya.

PAUL SAMUELSON SEBAGAI "NABI" EKONOMI

Buku teks ilmu ekonomi paling laris di dunia dan yang sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa di luar bahasa Inggris adalah buku Paul Samuelson, **Economics**, yang kini (2001) sudah mencapai edisi ke-16. Segera setelah terbit edisi pertama tahun 1948 memang buku ini diterima baik karena padat, lengkap, mudah, dan menggunakan bahasa Inggris yang sederhana.

Samuelson mampu menjadikan ilmu ekonomi "laksana agama" dari kaum progresif yang "Tuhan"-nya tidak lain adalah **efisiensi** pasar. Apapun yang efisien adalah baik, dan yang tidak efisien buruk.

The goal of economics, in short, is progress; the means is an efficient economic system; the sinners are the special interests; the greatest danger posed for the world is cyclical instability and unemployment of resources that will lead to demagoguery, dictatorship and war.

*Far at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our **gods** for a little longer still.⁶⁾*

New "economic religions" have emerged that could provide secular religious blessings in place of the old Judeo – Christian theologies. Economists have been

modern priesthood, capable of establishing the social legitimacy of market institutions defined in religious terms more acceptable to the modern age grounded in "scientific" truth⁷⁾

Any old religion may do for economic purposes, as long as it is truly believed in and support the market and other economic institutions, but a religion will not be believed in unless it can successfully assert a truth claim about the world⁸⁾

Karena ternyata penerapan ajaran-ajaran ekonomi Samuelson membuahkan hasil berupa kemajuan ekonomi luar biasa bagi bangsa Amerika, maka muncul keyakinan "Tuhan berpihak pada kami", dan **pasar** juga telah "diberkahi" oleh Tuhan (*God Bless The Market*). Lebih-lebih setelah bangkrutnya sistem ekonomi non pasar Uni Soviet, bangsa Amerika makin yakin (sistem) pasar pasti menghasilkan efisiensi ekonomi nasional. Maka tidak mengherankan membaca judul Laporan Pembangunan Dunia (*World Development Report*) 2002 **Building Institutions for Markets**. Artinya **lembaga** harus ditemukan dan dikembangkan untuk "diabdikan" pada **pasar** karena pasar dan efisiensi yang dihasilkannya merupakan "Tuhan" itu sendiri. Ini sejalan dengan ajaran agama-agama besar khususnya Kristen dan Islam bahwa manusia diciptakan menjadi wakil Tuhan di dunia untuk mengabdikan kepada Tuhan (Allah). Kepercayaan pada Tuhan ini nyata tertulis pada uang dollar Amerika Serikat "*In God We Trust*", dan Dwight Eisenhower pernah sewaktu menjabat Presiden Amerika Serikat menyatakan :

America makes no sense without a deeply held faith – and I don't care what it is. A religious bases of civil mindedness and social solidarity is necessary; whatever it is.⁹⁾

⁶⁾ Robert Nelson, *Economics as Religion*. Pennsylvania, 2001. op. cit. hal. 110,112

⁷⁾ Robert Nelson, idem hal. 270

⁸⁾ Robert Nelson, idem hal. 302

⁹⁾ Robert Nelson, idem hal. 301

Demikian banyak pakar Ekonomi Amerika berhasil meraih Hadiah Nobel Ekonomi karena ajaran-ajarannya “terbukti”, dan bermanfaat bagi kemajuan ekonomi masyarakat Amerika yang kini ingin di”globalisasikan” supaya juga “memberi manfaat” pada bangsa-bangsa lain yang “belum beruntung”, yaitu negara bekas jajahan yang sedang berkembang.

*The most vital religion of the modern age has been economic progress... (economists) have been the modern priesthood of the religion of progress, interpreting its form, refining its messages, and assuring the faithful that progress would continue ... By promoting a culture of civil commitment to the market system, economists have put the power of religion to work in fending off these newer temptations of a modern kind of “devil”.*¹⁰⁾

EKONOMIKA DAN IDEOLOGI

Banyak pakar ekonomi Indonesia penganut paham arus utama Neoklasik menyatakan keberatan memasukkan ideologi Pancasila dan **asas kekeluargaan** yang termuat dalam pasal 33 UUD 1945 ke dalam sistem ekonomi Indonesia. Menurut mereka ekonomika harus bersifat ilmu positif (*positive science*) yang membahas **das sein** bukan ilmu ekonomi normatif yang membahas **das sollen**.

*Pendapat Mubyarto-Hidayat cs ini memang bertentangan dengan pendapat yang dewasa ini secara umum dianut oleh para ilmuwan dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Menurut pendapat umum ini tugas utama ilmu pengetahuan sosial adalah menyusun teori-teori yang bersifat **nomologis**; artinya mencari hukum-hukum **empiris** yang dapat digunakan untuk membuat ramalan-ramalan (*prognosa*). Hukum-hukum empiris tidak bersifat normatif, sebab hukum-hukum ini hanya menyatakan sesuatu keadaan dalam kenyataan seperti*

*adanya. Bukan sebagai seharusnya ditinjau dari prinsip-prinsip moral dan etika.*¹¹⁾

*Kritik terakhir pada gagasan Mubyarto adalah pendekatan ilmiahnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Seperti juga ahli-ahli ilmu sosial lain umumnya di Indonesia yang saya anggap merupakan kelemahan, pendekatannya bersifat **normatif**, karena itu **a-historis**.*¹²⁾

*Sekiranya terdapat ilmuwan yang ingin memasukkan motif non-ekonomis ke dalam pengkajian ilmu ekonomi, hanya disebabkan keinginan mendekatinya dari segi **moral** secara **normatif**, maka saya berkeberatan. Sebab ilmu pada dasarnya mempelajari apa adanya dan bukan apa yang seharusnya. Pendekatan seperti ini berarti, bahwa ilmu ekonomi surut lagi ke belakang, ke abad pertengahan ketika ilmu merupakan **moral terapan**.*¹³⁾

Dari beberapa komentar tersebut yang semuanya dimuat di surat kabar harian, bukan di majalah atau jurnal ilmiah, dapat kita simpulkan adanya dikotomi antara ilmu yang **positif** dan yang **normatif**, dan ilmu atau teori ekonomi Pancasila adalah **normatif**. Sebenarnya seminar ekonomi Pancasila bulan September 1981 tidak pernah sampai pada perdebatan tentang teori atau ilmu ekonomi Pancasila tetapi tentang **Sistem Ekonomi** atau **aturan main** hidup berekonomi yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Memang jika dalam teori ekonomi Neoklasik hanya dikenal 2 sistem ekonomi (kapitalisme dan sosialisme), maka “tidak ada tempat bagi sistem ekonomi lain yang tidak mengacu pada 2 sistem ekonomi tersebut”. Tetapi jika Pancasila sejak Indonesia Merdeka tercantum sebagai ideologi bangsa, dan termuat jelas

¹¹⁾ Maruli Panggabean, Teori Ekonomi Pancasila: Nomologis atau Normatif, **Sinar Harapan**, 13 Agustus 1981.

¹²⁾ Arief Budiman, Sebuah Kritik Terhadap “Sistem Ekonomi Pancasila Mubyarto”, **Kompas**, 10 Juni 1981

¹³⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Tentang Ilmu Ekonomi Pancasila*, **Kompas**, 31 Juli 1981

¹⁰⁾ Robert Nelson, idem hal. 329

dalam Pembukaan UUD 1945, maka negara kebangsaan Indonesia termasuk para ilmuwan-nya sepatutnya mengacu pada ideologi tersebut sebagai pegangannya. Jika pemahaman yang demikian diterima tentunya sulit diterima kritik bahwa Mubyarto-Boediono telah “menuduh Arief Budiman belum paham Pancasila dengan sikap super”¹⁴⁾. Maruli Panggabean membabat pemikiran Mubyarto-Hidayat sebagai paham normatif, padahal “teori-teori yang normatif sekali pun tidak cukup hanya dengan menyebut-nyebut Pancasila saja, tetapi harus didahului penjelasan apa fungsi ilmu pengetahuan sosial di Indonesia”. Ilmu pengetahuan sosial menurut Maruli Panggabean (mengutip Max Weber) harus “bebas nilai” (*value-free*).¹⁵⁾

Keberatan dipakainya **ideologi** atau nilai-nilai dalam ilmu ekonomi sering didasarkan pada pengertian yang keliru tentang ideologi. Ideologi sebenarnya berarti **ilmu tentang ide**, ilmu tentang gagasan, yang tentu saja harus berperan dalam proses pengembangan setiap ilmu termasuk dan terutama menyangkut ilmu-ilmu sosial.

*Value judgments refer to conscious and piecemeal objective norms or subjective (moral) predilections, for example, that to eradicate poverty there should be a more political freedom enjoyed by the public. On the other hand, ideology refers to an unconscious, or “semi-conscious and total “world-view”. ... Value judgment are partial manifestations of total ideological commitments.*¹⁶⁾

Dari pengertian **ideologi** yang demikian jelas bahwa ideologi yang telah dimiliki suatu bangsa seperti Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak saja tidak boleh tetapi bahkan harus dipakai dalam menyusun sistem ekonomi

nasional. Dan untuk itu diingatkan definisi sistem ekonomi Joan Robinson (1962).

*The pre-requisites for an economic system is a set of rules, an ideology to justify them, and a conscience in individual which makes them strive to carry them out?*¹⁷⁾

ETIKA, AGAMA, DAN EKONOMIKA

Jika ilmu ekonomi modern cenderung memisahkan ajaran **efisiensi** dari ajaran **etika** yaitu ajaran benar-salah, atau ajaran adil-tidak adil, maka **ekonomika etik** (*ethical economics*) memaksakan penyatuan keduanya sebagaimana diteliti mendalam oleh Max Weber.

*By economic ethic he meant, as he did in his first study (The Protestant Ethic), not ethical and theological theories but the practical impulses toward action that derive from religion.*¹⁸⁾

Teresa Lunati secara lugas membedakan **economic man** vs **ethical man**, **Neoclassical firms** vs **ethical firms**, dan **Neoclassical markets** vs **ethical markets** seperti tersaji pada tabel 1.¹⁹⁾

Moral values and norms such as altruism, cooperation, solidarity, trust, honesty, truth – telling, obligation, duty, commitment, fairness, equality, are the main values of ethical man, of ethical firms, and ethical markets.

Kaitan erat antara **etika** dan **sistem ekonomi** menjadi makin jelas terlihat melalui peranan **ideologi**, untuk memberi dan sebagai pembenaran (*justification*) dari sistem ekonomi yang diterapkan.

*Economic Ethic is “the practical impulses for (economic) action which are founded in the psychological and pragmatic contexts of religion.”*²⁰⁾

¹⁴⁾ Pikiran Pembaca, **Kompas**, 30 Juni 1981

¹⁵⁾ Maruli H. Panggabean. **Idem**. Sinar Harapan 13 Agustus 1981

¹⁶⁾ Katouzian, Homa, *Ideology and Method in Economics*, Macmillan, 1980, op.cit. hal 131-136

¹⁷⁾ Robinson, Joan, *Economic Philosophy*, 1962

¹⁸⁾ Swedberg, R., Max Weber and the Idea of Economic Sociology, p. 134

¹⁹⁾ M Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics*. pp. 139 - 143

²⁰⁾ Swedberg R., idem hal 134

Tabel 1.

	Neoclassical	Ethical
Man	Selfish, rational utility maximizer, materialistic, unemotional, coolly calculating	Altruistic, cooperative, honest, truth telling, trusty, social gregarious.
Firms	Fiercely competitive, aggressive to gain market share and dominant position in market	Cooperative and loyal to all its stakeholders
Markets	Ethically neutral, amoral, apolitical, colour blind, accent-deaf	Historico-socio political, cultural as well as economic institutions

Ilmu Ekonomi Neoklasik ala Paul Samuelson mampu menguasai pemikiran ekonomi dunia adalah karena penyebarannya menggunakan **metode-metode agama**.

*Samuelson might be judged a large scientific failure and a great religious and economic success.*²¹⁾

*Beneath the surface of their economic theorizing, economist are engaged in an act of religious messages. Correctly understood these messages are seen to be promises of the true path to a salvation in this world to a new heaven on earth.*²²⁾

Pada masa Orde Baru, Pancasila pernah hampir menyaingi agama d.h.i agama Islam, sehingga TAP tentang P4 tahun 1978 diprotes oleh sejumlah partai-partai Islam. Namun pada akhir orde baru terbukti "Sistem Ekonomi Pancasila" gagal diterima dan masyarakat malah berbalik merasa "alergi" menggunakan istilah Pancasila sebagai acuan sistem ekonomi, dan acuan itu kemudian digeserkan ke **Sistem Ekonomi Kerakyatan**.

Buku Max Weber *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904-5) menggambarkan hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan

ekonomi. Weber mulai dengan analisis ajaran agama Kristen Protestan, dan menjelang akhir hayatnya dibahas pula (sosiologi) agama Cina (1915, Taoisme dan Confucianisme), India (1916 Hindu dan Budha), dan Yudaisme (1917).

Yang menarik, meskipun Weber merumuskan kesimpulannya setelah mempelajari secara mendalam ajaran-ajaran agama besar di dunia ini, namun berulang kali dijumpai kontradiksi-kontradiksi.

*The church did influence people's attitudes toward the economy but mostly in a negative manner because the economic mentality it furthered was essentially traditionalistic. The church like hierocracy more generally has casually encouraged a "non-capitalistic and partly anti-capitalistic" (mentality)*²³⁾

Dalam ekonomi Islam etika agama kuat sekali melandasi hukum-hukumnya. Namun juga disini banyak keberhasilan ekonomi orang Islam malahan didasarkan pada penyimpangan ajaran-ajarannya. Maka terkuaklah "rahasia" kontradiksi. Kapitalisme berhasil di kalangan umat Kristen karena perintah-perintah agama dikesampingkan, dan sebaliknya umat Islam miskin karena banyak firman Allah ditinggalkan.

²¹⁾ Robert H. Nelson, *Economics as Religion*. Pennsylvania, UP, 2001 op. cit h 300.

²²⁾ Robert H. Nelson, *Economics as Religion*. idem. op. cit hal xx.

²³⁾ Swedberg, Richard, *Max Weber and The Idea of Economic Sociology*. Princeton UP, 1998, up at 112

KKN DAN KAPITALISME PERKONCOAN

Dua istilah ini, KKN dan Kapitalisme Perkoncoan, sudah sering disatukan dalam KKNK (Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Kronisme), yang artinya semua praktek negatif dari (terutama) **birokrat** dan **dunia bisnis** yang karena terlalu jauh diarahkan pada pengejaran keuntungan pribadi, dengan mengorbankan kepentingan orang lain (rational-selfishness), telah menjadi penyumbang terbesar dari **krisis multidimensi** (terutama krisis perbankan) sejak 1997 sampai sekarang. Misalnya kontroversi tentang perpanjangan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) jelas menggambarkan posisi menteri-menteri tertentu bidang perekonomian apakah ia **memihak konglomerat** atau **memihak ekonomi rakyat**. Tentu harus dicatat bahwa “memihak” konglomerat tidak sama dengan “memusuhi” ekonomi rakyat, dan sebaliknya, meskipun akan terbukti kemudian bahwa jika PKPS lolos, perilaku konglomerat yang sudah kebablasan di masa lalu tentu akan terulang dan ekonomi rakyat akan lebih terganggu lagi.²⁴⁾ Dalam kaitan ini kekawatiran seorang Adam Smith dalam buku babon ilmu ekonomi *Wealth of Nations* (1776) ternyata tetap relevan di dunia bisnis di manapun termasuk di Indonesia sekarang.

People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to raise prices.

The interest of the dealers, however, in any particular branch of trade or manufactures, is always in some respect different from and even opposite to, that of the public ... To narrow the competition is always the interest of the dealers ... But to narrow the competition must always be

*against --- (the interest of the public), and can serve only to enable the dealers, by raising their profits above what they naturally would be, to levy for their own benefit, an absurd tax upon the rest of their fellow – citizens.*²⁵⁾

KKN yang kini telah menjadi semacam “musuh” (*momok*) ekonomi Indonesia muncul sebagai upaya menghindari persaingan. Dengan koneksi atau menemukan *konco* (kroni) pejabat atau birokrat, maka bisnis dapat dijamin dan keuntungan akan aman atau “sudah di tangan”. Sejumlah konglomerat Indonesia jelas lahir atau menjadi sangat besar (meraksasa) karena kolusi atau koneksi antara pengusaha dan oknum-oknum pejabat pemerintah. Yang lebih hebat lagi dan terjadi dengan mudah adalah jika pengusaha adalah anak pejabat penting, karena pejabat tertentu terang-terangan tanpa melalui tender memberikan proyek atau bisnis besar kepada anak-anaknya sendiri. Kadang-kadang anak-anak pejabat ini benar-benar terlibat langsung sebagai pengusaha. Tetapi yang lebih sering terjadi, anak-anak pejabat hanya dipinjam namanya, atau perusahaan yang didirikan memberikan saham kosong kepada anak pejabat bersangkutan, sehingga tanpa modal anak pejabat tersebut ikut menjadi pemilik sejumlah perusahaan.

Selama periode konglomerasi 1987 – 1994, bersamaan dengan proses perkembangan liberalisasi/deregulasi, pertumbuhan bank-bank swasta yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha besar tertentu, mampu menjadi besar dan pada saat bersamaan mampu membesarkan perusahaan dari para pemilik Bank, karena dana pihak ketiga lebih banyak dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan milik sendiri, meskipun sebenarnya ada batasnya (BMPK – Batas Maksimum Pemberian Kredit). Pelanggaran demi pelanggaran batas pemberian pinjaman kepada

²⁴⁾ Sidang Kabinet Megawati tanggal 7 Maret 2002 ternyata memutuskan menolak perpanjangan PKPS sehingga para obligor besar diharuskan menyelesaikan utang-utangnya dalam waktu 3 bulan.

²⁵⁾ Dikutip dalam E.K. Hunt, *History of Economic Thought A Critical Perspective*. Wodsworth, 1979, op.cit. hal 55- 56

perusahaan sendiri inilah yang mempercepat kebangkrutan Bank-bank swasta, yang 16 diantaranya ditutup pemerintah tanggal 1 November 1997, dan yang lebih merangsang *rush* pada hampir semua bank swasta lain yang sejak itu masuk rumah sakit BPPN.

Bahwa proses deregulasi/liberalisasi perbankan ini menjadi kebablasan diakui oleh Radius Prawiro dalam bukunya.

*Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal dengan demikian, menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling berkembang.*²⁶⁾

Pengakuan Radius Prawiro ini menarik bila dikaitkan dengan pendapat Suhadi Mangkusuwondo yang disebutkan diatas tentang **Jakarta School of Economics** yang dibantah telah mengajarkan paham ekonomi liberal. Disini terlihat bahwa pemerintah yang menurut amanat pasal 33 UUD 1945 harus "menguasai" perekonomian nasional (pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak), telah "kebobolan" melalui liberalisasi keuangan dan perbankan tahun 1983 dan kemudian 1988.

Cukup menarik bahwa pengalaman sangat pahit kebijakan liberalisasi perbankan yang berakibat krisis moneter 1997 dewasa ini tidak dianggap sebagai kekeliruan oleh sementara pakar ekonomi arus utama (Neoklasik). Yang selalu ditonjolkan justru adalah bahwa ekonomi Orde Baru (sampai 1996) harus diakui telah berhasil (sukses) memajukan ekonomi Indonesia karena kebijakan yang liberal tersebut. Maka "pemulihan ekonomi Indonesia tidak mungkin dan tidak boleh

meninggalkan kebijakan yang telah terbukti berhasil tersebut".

*Indonesia's success in recent years is largely attributable to liberalization and its recent troubles to some extent reflect failure to carry through the principles of liberalization to certain key areas. The key to recovery and future success, therefore, is to pursue further liberalization, not to wind back that has already been achieved.*²⁷⁾

ILMU EKONOMI DAN MASALAH-MASALAH SOSIAL

Jika pendiri mazab Neoklasik **Alfred Marshall** hidup kembali, pasti ia sangat sedih, seperti halnya **Adam Smith** pendiri mazab Klasik, bahwa ajarannya hanya separonya saja diterapkan yaitu pendekatan **deduktif**, sedangkan ajaran yang separonya lagi yaitu pendekatan sejarah yang **empirik-induktif** sama sekali dilupakan. Namun kesalahannya tidak dapat dilepaskan dari "keteledoran" Alfred Marshall sendiri yang telah membiarkan ilmu ekonomi sebagai disiplin menjadi penentu arah kegiatan ilmiah, dan masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat tidak dijadikan obyek yang harus dipecahkan.

*Because economics elected to be a deductive science, it abstracts from the historical character of what it studies and indeed from everything that cannot be quantified*²⁸⁾

*Marshall stated that the dominant aim of economics was to contribute to a solution of social problems. Yet the relation of his work to that end was quite indirect (this is) because he allowed his task to be determined **for him** by the discipline itself and not by the **social problem**.*

²⁶⁾ Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragmatisme dalam Aksi*, Elex Media Komputindo, 1998 op.cit. hal 409

²⁷⁾ McLeod, Ross, *Indonesia's Crisis and Future Prospect*, dikutip dalam Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*, YAE, 2002. hal 78

²⁸⁾ Daly H.E, J.B.Cobb, *For the Common Good*, Beacon Press, 1989, op.cit. hal 121, 124

Jika di negara-negara maju ilmu ekonomi dijadikan makin “ilmiah” dengan sasaran-sasaran analisisnya pada masalah-masalah non-ekonomi seperti keluarga (Gary Becker) atau agama (*the economics of religion*), maka di negara-negara berkembang orang-orang awam makin frustrasi karena ilmu ekonomi nampak tak berminat pada masalah perbaikan pemerintahan (*governance*).

*The Neoclassical economist typically is not concerned with the usefulness of the theory to governance; it suffices for him that the theory is useful and applicable in problems involving maximization of return from the use of scarce resources.*²⁹⁾

Jika ilmu ekonomi Neoklasik tidak berminat menganalisis masalah-masalah sosial di negara-negara sedang berkembang, tetapi mengurung diri sebagai disiplin yang kaku maka ia bukan lagi ilmu sejati tetapi sekedar sebagai **ideologi**, itupun ideologi yang tidak mengikat, sehingga tidak berguna bagi pembangunan masyarakat, dan malahan ia menjadi penghambat pemecahan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat.³⁰⁾

*Neoclassical economics is neither positive nor a normative science. It is used extensively as a rhetorical device in support of policies arrived at independently. In its populist version, it enters into the Weltanschauung/Mind Set/Myth Structure of our culture, and thus becomes a lens through which individuals observe the world about them and guide their behavior. To the extent it contributes to a materialistic, hedonistic, greedy and avaricious life style, it is greatly to be deplored. Its most destructive impact, however, is to debar other paradigms, ad in particular the socio-economic paradigm, from a respective hearing.*³¹⁾

Salah satu manifestasi paling buruk dari penerapan teori ekonomi Neoklasik di Indonesia adalah tidak pernah diperhatikannya data-data empirik perekonomian daerah yang sering sangat berbeda dengan data-data agregat yang tercatat di Jakarta. Misalnya tentang kontraksi ekonomi amat besar (-13.4%) tahun 1998 yang berdasar kurs dolar telah “menurunkan kesejahteraan bangsa” Indonesia (pendapatan perkapita) dari USD 1200 menjadi USD 600. Data kontraksi ekonomi di luar Jawa hanya -4,4% bahkan di Irian Jaya tahun 1998 masih tumbuh positif 12,8%.

Dalam rangka menganalisis dampak krismon 1997/98 dan kebijakan serta program-program “pemulihan ekonomi”, metode analisis yang semata-mata deduktif ini sungguh tidak realistis jika tidak dapat dikatakan keliru.

*Neoclassical economics often constitutes an impediments rather than a help in the analysis of a real-world problem because it prevents piercing through the layer of assumptions about consumer sovereignty and consumer preference contained in it.*³²⁾

*Neoclassical economics accepts that people within the same country can have different preferences but never asks why such differences have come about.*³³⁾

Demikian pengajaran ilmu ekonomi di Universitas-universitas yaitu model atau sistem Neoklasik terus menerus dipertanyakan namun tak tergoyahkan:

*... it is the available doctrine. Student arrive; something must be taught; the Neoclassical model exists.*³⁴⁾

PENUTUP

Pancasila memuat semacam “janji-tekad” dari seluruh warga bangsa untuk bekerja keras

²⁹⁾ Monroe Burk, Ideology and Morality in Economic Theory, dalam A Lewis & K.E. Warneryd (eds) *Ethics and Economic Affairs*, Routledge, 1994, op.cit. hal 314

³⁰⁾ Monroe Burk, Idem hal 313

³¹⁾ Monroe Burk, Idem hal 320-321

³²⁾ Monroe Burk, idem hal. 322

³³⁾ Yoshihara Kunio, *Asia Per Capita*, Curzon, 2001. hal. 212

³⁴⁾ John K. Galbraith, *Economics and the Public Purpose*, Andre Deutsch, 1974. op.cit. hal 27

mewujudkan **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** melalui **ketakwaan** pada Tuhan yang Maha Esa, kesadaran **kemanusiaan**, semangat **persatuan-kebangsaan** dan **kerakyatan/demokrasi**. Bung Karno pada pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan dasar negara Indonesia Merdeka sebagai berikut:

- (1) Kebangsaan Indonesia; dan
- (2) Internasionalisme – atau Peri-kemanusiaan; yang diringkas dalam konsep **Socio-Nasionalisme**

Selanjutnya dasar

- (3) Mufakat – atau Demokrasi, dan
- (4) Kesejahteraan Sosial; diringkas menjadi **socio-demokrasi**;

Ke-4 dasar negara ini “dipanyungi” semangat dan sikap ke-5 yaitu **bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa** atau **Prinsip Ketuhanan**.³⁵⁾

Jelas di sini bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menggambarkan sifat Ketakwaan seluruh warga bangsa memayungi sila-sila **socio-nasionalisme** dan **socio-demokrasi**. Jika urutan Pancasila kita sekarang sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

- (1) Ketakwaan,
- (2) Kemanusiaan,
- (3) Kebangsaan (Persatuan),
- (4) Demokrasi (Kerakyatan), dan
- (5) Keadilan sosial,

maka jelas bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang serba-berkecukupan (adil-makmur) **dasar-dasar etika** kita adalah ketakwaan dan kemanusiaan, sedangkan **metode kerja**-nya adalah kebangsaan/nasionalisme, dan demokrasi/kerakyatan.

Bung Hatta yang mendukung penuh Pancasila sebagai pedoman melaksanakan

sistem “ekonomi terpimpin” menegaskan bawa politik kemakmuran Indonesia ialah politik yang didasarkan pada “pembangunan tenaga beli rakyat” yaitu dengan memperbesar produksi sekaligus menyediakan lapangan kerja penuh.

*Apabila di dalam pembukaan UUD 1945 tersimpul tujuan bangsa dan Pancasila sebagai pegangan dalam melaksanakannya, dalam UUD sendiri terdapat beberapa peraturan tentang melakukan ekonomi terpimpin. Peraturan itu terdapat dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Yang pertama mengenai sistem yang kedua mengenai hak sosial warga negara, dan yang ketiga mengenai tugas Pemerintah. Pasal 33 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Maksudnya ialah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.*³⁶⁾

Demikian sistem Ekonomi Indonesia yang mampu mewujudkan cita-cita Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menentang **individualisme** dan **kapitalisme** yang kini merajalela kembali melalui ideologi neoliberalisme dan gerakan globalisasi. Teori, “ideologi”, serta “agama” yang menjadi kekuatannya adalah ajaran ekonomi Neoklasik yang sangat sukses di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat tetapi gagal di negara-negara lain di luar itu. Itulah yang dipertanyakan secara tajam oleh Hernando de Soto dalam bukunya **The Mystery of Capital: why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else**.³⁷⁾

The three Indochinese countries (Vietnam, Laos, and Cambodia) are poor today because they experimented with central

³⁵⁾ Bung Karno, Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945.

³⁶⁾ Bung Hatta, Pidato dalam Pengarahan kepada Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila, 21 Juni 1979

³⁷⁾ Hernando De Soto, *The Mystery of Capital*, Black Swan, 2000

*planning and their economies deteriorated during that period ...*³⁸⁾

Indonesia dewasa ini menghadapi banyak masalah (ekonomi-politik-sosial-budaya) karena setelah gagal 7 tahun bereksperimen dengan sistem ekonomi komando (1959-66), kemudian "bereksperimen" lebih berani lagi dengan sistem ekonomi kapitalis liberal selama 30 tahun (1967-97). Eksperimen sistem ekonomi kapitalis liberal berdasarkan teori ekonomi Neoklasik tak terkendalikan dan kebablasan, karena pimpinan nasional yang otoriter tidak pernah mendengar kritik-kritik membangun dari ilmuwan dan masyarakat luas. Dalam periode 7 tahun mendatang (2001-08), perekonomian Indonesia akan "belajar" lagi, dan tidak sepatutnya bereksperimen lagi, untuk menemukan sistem ekonomi yang tepat sesuai budaya bangsa yang berideologi Pancasila, yaitu Ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Para pakar ekonomi khususnya dosen-dosen perguruan tinggi dihimbau untuk meningkatkan penelitian-penelitian empirik agar dapat **membumikan** ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Neoklasik dari Barat yang sering disebut **ilmu positive** harus disebut ilmu yang **normative di Indonesia** karena didasarkan pada asumsi-asumsi dan kondisi positive masyarakat ekonomi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Partadiredja, *Ekonomika Etik*, Himpunan Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM, Ilmu-ilmu Sosial, 1949-1999, 2000
- Boulding, Kenneth, *Economics as a Science*, McGraw-Hill, 1970
- De Soto, Hernando, *The Mystery of Capital*, Black Swan, 2000

- Dopter, Kurt et al, (eds), *Economics in the Future*, Macmillan, 1976
- Galbraith, J.K, *Economics and the Public Purpose*, Andre Deutsch, 1974
- Katouzian, Homa, *Ideology and Methods in Economics*, Macmillan, 1980.
- Lewis, Alan & Kare-Erik Warneryd (eds), *Ethics and Economic Affairs*, Routledge, 1994
- Lunati, M. Teresa, *Ethical Issues in Economics*, Macmillan, 1997.
- Mahen, John.E, *What is Economics*, John Wiley & Sons, 1969.
- Nelson, Robert H, *Economics as Religion*, Pennsylvania State UP, 2001.
- Ormerod, *The Death of Economics*, Faber & Faber, 1994.
- Ward, Benyamin, *What's Wrong with Economics*, Basic Book, New York, 1972
- Wilber, Charles K, *Economics, Ethics, and Public Policy*(eds), Rowman & Littlefield, 1998.
- Wilson, Rodney, *Economics, Ethics, and Religion*, Macmillan, 1999
- Yoshihara Kunio, *Asia Per Capita: Why National Incomes Differ in East Asia*, Curzon, 2001

³⁸⁾ Yoshihara Kunio, *Asia Per Capita: Why National Incomes Differ in East Asia*, Curzon, 2001, hal. 61

